

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Rahayu, & Wahyudi, H. (2021). Lembaga administrasi negara republik indonesia. *Lan RI*, 1, 1-68.
- Arif, A., Basri, M., & Mustafa, L. O. (2022). Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan Wolo. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 2502-5589.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Fandi Alfiansyah Siregar. (2017). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan*. 11(1), 92-105.
- Listiani, T. (2004). Implementasi Kebijakan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik ( Studi Di Pdam Kota Bandung ) Public Service Policy. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 4(3), 319-333.
- Margareth, H. (2017). UU no 25 tahun 2009 pelayanan publik. *Экономика Региона*, 32.
- Muhammad Sawir. (2022). *Akuntabilitas Organisasi Publik.pdf* (p. 145).
- Mukhilda, 2013. (2013). *Skripsi Akuntabilitas Pelayanan Publik ( Studi Kasus : Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Program Studi Administrasi Negara*.
- Nur, N., Siregar, A., Ginting, S., & Trimurni, F. (2023). *SAJJANA : PUBLIC ADMINISTRATION Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan ( S-IMB ) Rumah Tinggal Di Dinas Penanamanmodal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Public Service Accountability In The Manag. 01(01)*, 1-9.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40-52.
- Raba, Manggaukang, 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM Press.
- Rofianti. (2017). Studi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Samsat Pembantu Samarinda Seberang. *EJournal Administrasi Negara*, 5, 6143-6154.
- Rosman. (2014). Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *EJournal Ilmu Pemerintahan* , 2(2), 2753-2766.

- Simamora, J. (2021). *AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK ( Studi Kasus Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pada Kantor Camat Medan Labuhan Kota Medan )*.
- SUCI, A. A. N. (2015). AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK. *Skripsi*, 1-23.
- SUKMAWATI. (2016). Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin. *Skripsi*.
- Supriadi, M. N., Tinggi, S., Arastamar, T., Manullang, S. O., & Krisnadwipayana, U. (2021). *Pelayanan Publik* (Issue October 2020).
- Ummah, M. S. (2019). PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI BARU. In *KM* (Vol. 11, Issue 1).
- Usman, N. N., Usman, J., & Abdi. (2016). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Sim) Di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar. *Administrasi Publik*, 2(2), 195-205.
- Verawati, A., Lestari, H., & Rengga, A. (2014). Analisis Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Bidang Perizinan Usaha di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and ....*

### **Peraturan Perundang-undangan**

- TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan nepotisme
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP).
- Keputusan Menteri PAN Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Undang-Undang No.25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.